



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN KARANTINA PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUDIRMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **163084**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.727.000.000**

1. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 412.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 90.000.000**

1. MOTOR, HONDA DIB026261.2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



2. MOBIL, RUSH RUSH 1,5 S AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	324.443.904
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.157.443.904
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.157.443.904

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.